

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)

Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru

Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril

Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan *Gemeente* Mojokerto Tahun 1918-1942

Firmanda Dwi Septiawan

Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir

Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati

Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia

Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti

Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional

Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri

Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV

Siti Khusnul Khotimah, Yuliati

Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia

Privera Ajeng Ersanda

Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Ira Sugiarnik

Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX

Yohanes Purwanto



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (Universitas PGRI Silampari)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Kunto Sofianto, M.Hum., Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (Universitas PGRI Silampari)

Dewi Angraini, M.Si. (Universitas PGRI Silampari)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2022)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Pengaruh Variasi Media terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru <i>Thasya Maleno, Bedriati Ibrahim, Asril</i>	79
2. Dinamika Sosial Perkembangan Pemerintahan <i>Gemeente</i> Mojokerto Tahun 1918-1942 <i>Firmanda Dwi Septiawan</i>	88
3. Kerajinan Anyaman Purun sebagai Warisan Turun Temurun Masyarakat Tanjung Atap, Ogan Hilir <i>Syarifuddin, Supriyanto, Chindi Ayu Shonia, Mailiza Hidayati</i>	98
4. Partai Islam dalam Pemilu 1955: Pilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia <i>Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, Ganjar Eka Subakti</i>	106
5. Pola Insurgensi Andi Azis sebagai Pemberontakan Militer dalam Pendekatan Model Keamanan Nasional <i>Novky Asmoro, Pujo Widodo, Resmanto Widodo Putro, Rizki Putri</i>	114
6. Hubungan Perdagangan Majapahit dengan Tiongkok Abad XII-XIV <i>Siti Khusnul Khotimah, Yuliati</i>	128
7. Eksistensi Pemikiran John Dewey dalam Pendidikan di Indonesia <i>Privera Ajeng Ersanda</i>	134
8. Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMA Negeri 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir <i>Dasyuniar, Bedriati Ibrahim, Asril</i>	141
9. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900-1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi <i>Ira Sugiarnik</i>	150
10. Kerja Sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX <i>Yohanes Purwanto</i>	164

GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA DAN KEBIJAKANNYA PADA TAHUN 1900-1945 SERTA KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI

Ira Sugiarnik

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember

Alamat korespondensi: iradicky496@gmail.com

Diterima: 15 Maret 2022; Direvisi: 30 Mei 2022; Disetujui: 15 Juni 2022

Abstract

The Dutch East Indies government itself is an extension of the Dutch kingdom. In moving the government every day the Governor General is Followed by an Institution Named the Algemeene Secretariat, a special institution in the governorate, specifically dealing with correspondence policies that will be issued by the Dutch East Indies government. Colonial administration is dualistic, it means that there are two layers, the background of the emergence of this dualistic government is actually still related to the implementation of the culture which in this practice really requires cooperation with local aristocrats, another goal of implementing this dualistic system as the main tool in maintaining conditions colonialism, especially regarding the interests of the mother country in this colonized land. Under the authority of the governor general of the Dutch East Indies at that time, there was an assumption that all existing affairs and problems could be handled properly if decentralization was implemented. Decentralization itself is a consequence of the Ethical Policy which was heavily campaigned at the end of the 20th century. The implementation of this decentralization eventually led to the formation of regional councils. One of the forms of the decentralization law was the formation of the People's Council or Volksraad on May 18, 1918, to be precise during the governor general van Limburg Styrum.

Keywords: *Govenor general, Dutch East Indies, policy.*

Abstrak

Pemerintah Hindia belanda sendiri merupakan kepanjangan dari kerajaan Belanda. Dalam menggerakkan roda pemerintahan setiap harinya Gubernur Jenderal didampingi oleh sebuah Lembaga yang Bernama Algemeene Secretarie, Lembaga ini bertugas di kantor gubernur jenderal, secara khusus Lembaga ini menangani korespondensi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda. Administrasi pemerintahan kolonial bersifat dualistis, itu artinya terdapat dua lapisan birokrasi, mengenai latarbelakang munculnya dualistis pemerintahan ini sebenarnya masih berkaitan dengan pelaksanaan cultuurstelsel dimana dalam praktik ini sangat membutuhkan kerjasama dengan para priyayi lokal, tujuan lain dari diterapkannya sistem dualistis ini sebagai alat utama dalam mempertahankan kondisi kolonial khususnya mengenai kepentingan negara induk di tanah jajahannya ini. Dibawah kekuasaan gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu ada anggapan semua urusan dan masalah yang ada dapat tertangani dengan baik apabila diterapkannya desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan konsekuensi dari Politik Etis yang gencar dikampanyekan akhir abad 20. Penerapan desentralisasi ini akhirnya mendorong terbentuknya dewan-dewan daerah. Bentuk implementasi dari undang-undang desentralisasi salah satunya dibentuknya dewan rakyat atau Volksraad pada 18 Mei 1918 tepatnya pada masa gubernur jenderal van limburg stirum.

Kata Kunci: Gubernur jenderal, Hindia Belanda, kebijakan.

A. Pendahuluan

Latarbelakang terbentuknya Gubernur Jenderal tidak terlepas dari usaha pemerintah Belanda dalam mempermudah pengawasan dan pengelolaan tanah jajahannya. Maka dibentuklah Gubernur Jenderal,

gubernur jenderal sendiri merupakan ketua Rad van Naderlandsch-Indie atau organisasi pusat pemerintah kolonial Hindia Belanda yang anggotanya tidak lebih dari enam orang. Gubernur Jenderal pertama adalah Pieter Both

yang memerintah pada tahun 1610. Meskipun bentuk kepemimpinan seperti ini diterapkan pada saat masa VOC ternyata kepemimpinan gubernur jenderal terus digunakan hingga masa pemerintahan Hindia Belanda, namun hanya saja kedudukan dewan hindia (Raad van Indie) bertugas sebagai dewan penasihat. (Hisyam dan Ardhana 2012: 54)

Pada awalnya pengaruh badan-badan pemerintahan pusat terbatas karena titik berat pekerjaan pemerintah berada di bawah korps Pegawai pemerintahan dalam negeri. Hal itu berubah sekitar tahun 1900. Disamping itu krisis ekonomi yang melanda Hindia pada kuartal terakhir abad ke - 19 membukakan kesadaran bagi pemerintah Hindia Belanda bahwa liberalisme ekonomi yang selama ini diterapkan tidak membawa kemakmuran khususnya bagi masyarakat pribumi (Anrooij, 2012: 6).

Kemudian terdapat salah satu kabinet yang mengemukakan pendapatnya bahwa kasih sayang kepada manusia harus menjadi dasar kebijakan pemerintah kolonial belanda. Terdapat pidato ratu belanda yang mengandung perhatian terhadap nasib kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pernyataan yang kemudian menjadi terkenal, bahwa Belanda sebagai (Negara Kristen) memiliki kewajiban untuk menjalankan balas budi karena tanah hindia belanda sudah banyak membawa keuntungan bagi negara induk, oleh karena itu Belanda harus memenuhi suatu panggilan moral. Pernyataan itu segera diikuti dengan persetujuan untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap penyebab kurangnya kemakmuran penduduk di Hindia Belanda (Anrooij, 2012: 6).

Di samping itu memang mulai muncul suara dari pihak Belanda yang

turut mendukung adanya sebuah perhatian kepada masyarakat Hindia Belanda yang selama ini hidup dibawah ketertindasan (Ricklefs, 2007;319) Disamping itu pada tahun 1899 Van Deventer seorang ahli hukum menulis sebuah artikel yang berjudul *Een eereschuld* atau suatu hutang kehormatan. Menurutnya ekspolitas tanah jajahan yang dilakukan oleh Belanda telah banyak mendatangkan keuntungan bagi Belanda, sedangkan bangsa Indonesia tetap berada dalam kemiskinan. Kekayaan yang telah dirampas itu menurutnya sudah seharusnya dikembalikan kepada bangsa Indonesia melalui hal-hal yang dianggap dapat menghantarkan Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Maka sejalan dengan penyelidikan yang telah dilakukan mengenai penyebab rendahnya tingkat kemakmuran penduduk Indonesia maka pendidikan, irigasi, dan 5 perpindahan penduduk dimasukan dalam program *politi etis* (Ricklefs, 2007;320). Politik *etis* memberikan perubahan terhadap arah tujuan pemerintah kolonial di tahun 1900-an, pasalnya setiap kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal mengacu pada tiga hal yang termuat didalam politik *etis*. Oleh karena itu mereka tidak lagi terlalu memperlihatkan eksploitasi dan menggantikan dengan pernyataan keprihatinan atas nasib kesejahteraan bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metodologi sejarah studi kepustakaan. Penulis ini menggunakan prosedur penelitian dengan lima tahapan yaitu pemilihan topik, pencarian dan pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, penulisan kembali

sesuai dengan sumber yang valid. (Kuntowijoyo, 2013: 69)

Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Dan Kebijakannya Pada Tahun 1900 S/D 1945 Serta Kondisi Sosial Budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, artinya penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Kuntowijoyo, 2013: 69)

Hal pertama yang dilakukan yaitu mencari dan mengumpulkan beberapa sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan memanfaatkan media elektronik. Selanjutnya penulis melakukan kritik pada sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menguji kebenaran isi dokumen. Tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan makna yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan yang terakhir, menuliskan kembali informasi-informasi yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

Data dan Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi berupa data. Dalam Artikel ini menggunakan sumber data berupa Buku, Artikel pada Jurnal Ilmiah, Artikel dari Internet, dan Skripsi.

C. Pembahasan Kehidupan Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan Hindia belanda sendiri merupakan kepanjangan dari kerajaan Belanda. Dalam menggerakkan roda pemerintahan setiap harinya Gubernur Jenderal didampingi oleh sebuah Lembaga yang bernama Algemeene

Secretarie, Lembaga ini bertugas di kantor gubernur jenderal, secara khusus Lembaga ini menangani korespondensi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda. Administrasi pemerintahan kolonial bersifat dualistis, itu artinya terdapat dua lapisan birokrasi, mengenai latarbelakang munculnya dualistis pemerintahan ini sebenarnya masih berkaitan dengan pelaksanaan cultuurstelsel dimana dalam praktik ini sangat membutuhkan kerjasama dengan para priyayi lokal, tujuan lain dari diterapkannya sistem dualistis ini sebagai alat utama dalam mempertahankan kondisi kolonial khususnya mengenai kepentingan negara induk di tanah jajahannya ini (Soejono & Leirissa. 2010: 10).

Dualistis kekuasaan ini sendiri telah tercantum didalam Pasal 67 dari Regeringsreglement (Peraturan Pemerintah) memutuskan bahwa penduduk pribumi, selama situasinya memungkinkan, sebisa mungkin harus dibiarkan di bawah wewenang kepala daerah mereka sendiri. Para kepala itu harus diangkat 2 atau diakui oleh gubernur jenderal. Tugas dari pemerintah dalam negeri menyangkut pengaturan atau pengelolaan pemerintahan dalam negeri (Hindian Belanda), melakukan kerja sama dengan dan mengawasi pegawai pemerinthan eropa maupun pribumi, serta melakukan penjalinan hubungan dengan inlandse vorsten en groten seperti raja dan petinggi pribumi. (Anrooij, 2012: 14).

Dasar dari pemerintah kolonial Hindia belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, undang-undang ini memuat syarat-syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan negara induk.

Pemerintahan Dalam Negeri (Binnenlands Bestuur)

a) Pemerintahan Eropa, birokrasi ini sepenuhnya diisi oleh orang-orang Eropa. Jabatan tertinggi didalam birokrasi ini adalah residen, kemudian dibawah residen terdapat asisten residen. Asisten residen memiliki wewenang untuk memimpin sebuah wilayah atau afdeling. Susunan birokrasi di zaman Hindia Belanda sebenarnya tidak jauh berbeda dimasa sebelumnya (VOC) dimana jenjang birokrasi dimulai dari yang paling terendah.

b) Pemerintahan Pribumi, didalam birokrasi ini yang mengepalai adalah bupati (regent), posisi dibawahnya adalah patih. Sejak 1913 terdapat kriteria khusus untuk pengangkatan bupati. Dimana calon bupati harus berpendidikan paling tidak merupakan lulusan OSVIA, memiliki pengalaman kerja sebagai patih minimal 2 tahun. Rupanya pemerintah Hindia Belanda pada saat itu benar-benar ingin meningkatkan kualitas para pejabatnya. Hal ini terlihat di tahun 1914 pemerintah Hindia Belanda mendirikan bestuurschool, melalui bestuurschool diharapkan mereka yang lulus bisa menjadi patih atau bupati.

c) Pemerintahan Timur Asing, didalamnya terdapat warga Cina dan Arab. Mengenai latar belakang ikut sertanya komonitas Cina dan Arab sebenarnya merupakan kesadaran pemerintah tentang keberadaan mereka yang telah lama bermukim jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara.

Pemerintahan Umum (Algemene Bestuur)

Pada dasarnya semua tugas administrasi pemerintah di Hindia Belanda dikerjakan oleh beberapa departemen dibidangnya masing-masing, seperti sipil, militer, dan

angkatan laut. Dari sekian banyak departemen yang mengurus masalah-masalah teknis, ternyata terdapat salah satu departemen yang paling dominan yaitu Departemen van Binnenlands Bestuur. Departemen ini ternyata tidak hanya mengurus persoalan didalam negeri tetapi juga mengurus tentang keamanan.

Dibawah kekuasaan gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu ada anggapan semua urusan dan masalah yang ada dapat tertangani dengan baik apabila diterapkannya desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan konsekuensi dari Politik Etis yang gencar dikampanyekan akhir abad 20. Penerapan desentralisasi ini akhirnya mendorong terbentuknya dewan-dewan daerah. Bentuk implementasi dari undang-undang desentralisasi salah satunya dibentuknya dewan rakyat atau Volksraad pada 18 Mei 1918 tepatnya pada masa gubernur jenderal van Limburg Stirum. Undang-undang desentralisasi semenjak 1903 mendorong terbentuknya dewan-dewan daerah, baik dewan ditingkat karesidenan maupun dewan ditingkat kota dimana mereka memiliki wewenang seperti membuat peraturan-peraturan pajak maupun infrastruktur (Soejono & Leirissa. 2010:33)

Anggota Volksraad terdiri dari mereka yang diangkat dan ditunjuk, keanggotaannya berasal dari rakyat bumi putra. Didalam Volksraad dibicarakan mengenai anggaran Hindia Belanda dan undang-undang yang menyangkut urusan dalam negeri, kemudian dirancang, didiskusikan dan diputuskan dalam persedingan dewan ini. Meskipun sebagai dewan rakyat dalam kenyataannya Volksraad tetap tidak memiliki wewenang untuk bisa menggeserkan petinggi birokrasi kolonial. Volksraad lahir semata-mata

dijadikan tanda bahwa pemerintah kolonial telah melakukan politik etis.

Kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda

a) Gubernur Jenderal W. Rooseboom (1899-1904) Sebelum menjabat sebagai seorang Gubernur Jenderal Rooseboom pernah bergabung dalam satuan militer, hal ini dapat diketahui disaat ia menjadi guru di sekolah tinggi militer di tahun 1874. Sebagai seorang gubernur Jenderal Williem Rooseboom memiliki kebijakan, dan kebijakan yang dibuatnya selama menjabat Sebagian besar fokus dalam dunia pendidikan. Kebijakan yang dibuat seperti memperluas penggunaan bahasa belanda, membangun pusat-pusat kursus bahasa Belanda, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat bumiputra, kemudian merekrut lulusan yang berkualitas ke dalam instansi pemerintahan Hindia Belanda.

b) Gubernur Jenderal Van Heutsz (1904-1909) Sebelum menjabat Van Heutsz adalah anggota militer yang berpangkat bintang 2, kemudian ia melanjutkan pendidikan militernya di Surabaya, karena karirnya yang cermelang akhirnya Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Disaat menjadi Gubernur, Van Heutsz didampingi oleh Dirk Fock. Fokus kebijakan yang dibuat mengarah pada dunia pendidikan. Hal ini terlihat dengan dibukanya sekolah desa atau sekolah rakyat. Didalam sekolah rakyat ini mereka diajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung. Namun sayangnya masyarakat desa memiliki tingkat antusias yang rendah. Dimasa kepemimpinannya ini Van Heutsz menyambut baik lahirnya organisasi Boedi Utomo. Menurutnya sebagai penerapan politik etis sendiri memang dirasa perlu menghadirkan organisasi-

organisasi semacam ini. Saat menjalankan roda pemerintahan ia di bantu oleh Dirk Fock. Van Heuts memperoleh penghargaan oleh masyarakat Belanda dimana namanya dijadikan sebagai nama sebuah kapal, monument, dan jalan.

c) Gubernur Jenderal Alexander Idenburg merupakan gubernur jenderal hindia belanda (1909-1916) yang mempraktikan pemikiran-pemikiran politik etis. Mengenai politik etis ini terdapat tiga hal yang dianggap merupakan dasar kebijakan baru tersebut yakni mengeni pendidikan, perpindahan masyarakat, dan pengairan. Sebagai seorang gubernur jenderal ia memiliki kebijakan dan kebijakan yang dibuatnya ini tidak terlepas dari adanya pengaruh konsep politik etis. Pada tahun 1915 di Batavia gubernur jenderal Idenburg membentuk sebuah komite sebagai upaya mempromosikan industri munafaktur di Hindia Belanda. Latarbelakang pembentukan komite ini disebabkan pada saat itu sedang dihadapkan oleh kondisi kapital yang terakumulasi di Hindia Belanda serta macetnya jalur perdagangan Eropa. Tugas komite ini untuk melakukan investigasi komoditas yang dapat diproduksi di Hindia Belanda. Namun dapat dikatakan komite ini sebenarnya tidak terlalu menghasilkan sesuatu yang signifikan, akan tetapi mereka dapat memperluas rencana perluasan industrialisasi, wacana yang dibuat ini kemudian direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik munafaktur di Hindia Belanda. Pabrik-pabrik tersebut diantaranya pabrik kertas, gas, korek, ban, obat malaria, bir, sabun, semen, pewarna, minyak, kain dan lilin. Untuk melakukan proyek-proyek seperti itu maka jelas pemerintah kolonial Hindia Belanda membutuhkan dana. Untuk

mengatasi hal itu maka pemerintah Belanda mengambil alih hutang pemerintah kolonial yang sebesar 40 juta gulden. Dengan cara ini maka diharapkan Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa terbebani hutang, kemudian politik etis dapat berjalan dengan lancar. Selain itu saat menjabat sebagai gubernur jenderal ia melakukan pengakuan terhadap Sarekat Islam, peresmian hutan depok sebagai kawasan cagar alam .

d) Gubernur Jenderal Limburg Stirum menggantikan idenburg pada tahun 1916. Pada awal masa pemerintahannya (1916-1921) Stirum memiliki kebijakan untuk memindahkan ibu kota Batavia ke wilayah yang pada saat itu kondisinya belum berkembang, dan ternyata wilayah itu adalah Bandung. Menurut gubernur jenderal Stirum, Bandung merupakan wilayah yang menguntungkan secara militer karena wilayahnya dikelilingi gunung dan berada didaratan tinggi dibandingkan dengan kota-kota di pesisir. Pada tahun 1917 Gubernur Jenderal van Limburg Stirum membentuk Waterkracht en Electriciteit Gevormd yaitu Departemen Tenaga Air dan Kelistrikan. Departemen ini didirikan untuk mencari kebijakan listrik yang dapat memberikan keuntungan maksimum dari pemakaian air untuk keperluan listrik (Izzudin,2020:6). Kemudian membentuk Departemen tenaga air dan listrik, gubernur van limburg Stirum membentuk sebuah dinas intelijen politik Politieke Inlichtingen Dienst pada tanggal 6 mei 1916. Tujuan dibentuknya departemen ini untuk melakukan pengamatan atau pengawasan terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri yangn dikhawatirkan dapat membahayakan kekuasaan pemerintah Belanda di tanah jajahnya ini.(Marieke Bloembergen,

2011;218). Selain departemen Gubernur Jenderal Stirum juga membentuk komite pertahanan Hindia atau Comite Indie Wererbar. Pada perkembanganya komite ini malah turut berkontribusi terhadap pembentukan Dewan Rakyat atau Volksraad (Ricklefs, 2005; 358).

e) Gubernur Jenderal Dirk Fock (1921-1926) Dirk Fock lahir di Den Haag pada tanggal 19 juni 1858. Sebelum menjabat di Hindia Belanda Dirk Fock sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Suriname. Pada masa kepemimpinanya Gubernur Jenderal Dirk Fock mengurangi lembaga penting dalam politik etis yaitu penasihat urusan bumiputra. Penghapusan Lembaga ini dianggap sebagai tanda berakhirnya politik etis, disamping itu di masa kepemimpinanya ini juga banyak sekali penindasan kepada masyarakat pribumi Beliau merupakan salah satu tokoh yang tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Jenderal Van Limburg menyangkut politik kesejahteraan (Shidiq,2014)

f) Gubernur Jenderal De Graf (1926-1931) Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, menurutnya tidak perlu menyamakan organisasi pergerakan seperti organisasi komunis. Sehingga dari situlah ia mulai memperbolehkan adanya kebebasan organisasi pergerakan. Dimasa kepemimpinanya ini ia banyak membuka perguruan tinggi baru, hal ini bertujuan agar pemerintah Hindia Belanda memperoleh pegawai yang memiliki keahlian yang baik. Tepat dimasa kepemimpinanya ini juga STOVIA berkembang menjadi sekolah kedokteran. Selain itu dunia perindustrianpun juga sedang berkembang pesat. Kebebasan yang selama ini di perbolehkan oleh Gubernur Jenderal de Graf pada akhirnya menimbulkan perpecahan

didalam masyarakat Hindia Belanda. Pada saat itu ia membuang para pemberontak yang memiliki hubungan dengan PKI ke kamp interniran Tanah merah di Boven Digul.

g) Gubernur Jenderal Cornelis de Jonge (1931-1936) Pada saat menjabat sebagai gubernur jenderal ia mengeluarkan peraturan Ordonasi pengawasan pada tahun 1932, pasalnya dimasa kepemimpinannya itu banyak terjadi pemberontakan, seperti yang terjadi di tahun 1933 terjadi pemberontakan oleh anggota Angkatan laut , pada 1 oktober 1932 melarang organisasi-organisasi yang ada untuk mendirikan pendidikan. Disamping itu sikapnya yang otoriter membuat ia bersikap keras kepada organisasi pergerakan nasional.

h) Gubernur Jenderal Lambertus Tjarda(1936-1942) Sebagai kelanjutan dari keadaan sebelumnya mengenai pemberontakan yang banyak terjadi diatasi dengan menhadirkan militer-militer yang Tangguh atau yang sering disebut KNIL. Gubernur Jenderal Lambertus Tjarda merupakan gubernur jenderal terakhir yang memimpin tanah Hindia Belanda ini. Gubernur Tjarda memiliki sikap yang ramah dan hal itu bertujuan agar organisasi pergerakan Indonesia tidak melakukan perlawanan yang dapat membahayakan pemerintah kolonial hindia Belanda. Akhir dari kepemimpinannya ini ditandai dengan masuknya Jepang ke Indonesia, dan mundurnya tantara Hindia Belanda mengakibatkan mereka harus menandatangani surat penyerahan di Kalijati.

Kondisi Sosial dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan waktu itu atau masa pergerakan barat tahun 1928 lebih banyak oleh pendidikan barat. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan

barat lebih diperluas dan memegang prinsip menjadi lebih terbuka. Meskipun sudah memiliki prinsip demikian, pendidikan barat ini tetap membatasi, karena memang pada dasarnya pendidikan ini tidak sepenuhnya bersifat terbuka dan hanya sedikit dari masyarakat yang berasal dari kolonial hanya mengirimkan anaknya untuk memperoleh pendidikan pada sekolah bergaya barat ini. (Sartono:1999)

Setelah dicanangkannya politik etis, program pengembangan pendidikan bagi pribumi di Hindia Belanda digalakan secara lebih serius, rintisan pengemabngan ini sudah dimulai masa pemerintahan Deandels (1808-1811). Pada tahun 1809 Deandels berinisiatif mendirikan sekolah ronggeng di Cirebon. Pada awalnya sekolah Ronggeng itu dimaksudkan untuk mendidik remaja, pada praktiknya menyebabkan kerusakan moral bagi gadis-gadis sehingga sekolah itu ditutup. Guna Mengatur pelaksanaan kegiatan pendidikan pribumi pemerintahan kolonial mengeluarkan indisch staatsblad 1893 nomor 125 yang menetapkan pembagian sekolah Bumiputera menjadi sekolah dasar kelas 1 dan sekolah dasar kelas 2. Jika sekolah dasar kelas 1 lama belajarnya ada 5 tahun dan mata pelajarannya adalah membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar dan ilmu ukur tanah. Adapun sekolah dasar kelas 2 diperuntukkan untuk rakyat biasa lama pendidikan nya adalah 3 tahun mata pelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis dan berhitung. Bahasa pengantar menggunakan bahasa daerah dan jika tidak mungkin digunakan bahasa Melayu. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 201)

Dengan demikian pemerintah kolonial itu tidak bersungguh-sungguh berkeinginan untuk mencerdaskan anak pribumi hal itu dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan sekolah dasar kelas 2 apabila guru yang mengajar tidak mempunyai kualifikasi tertentu. Guna meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar kelas 2 maka pada 1902 lama belajarnya ditingkatkan menjadi 5 tahun. Sejak 1915 sekolah dasar kelas 2 dapat berdampingan dengan sederajat dengan sekolah lain yaitu *Vlogschool* lanjutan dari *Volkschool* yang lama belajarnya 3 tahun. Sekolah ini dibuka sejak 1907 karena krisis tahun 1930 pemerintah harus melakukan penghematan secara lebih ketat sehingga sekolah dasar kelas 2 diubah menjadi *Volkschool* selama 3 tahun dan lanjutannya adalah *Vervlogschool* selama 2 tahun. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 202)

Pada masa Sultan Hamengku Buwono VII kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk putra putri keraton ternyata tidak cukup hanya pendidikan tradisional Jawa saja, dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat kerajaan. Oleh karena itu selain pelajaran yang bertujuan untuk memupuk rasa cinta kepada kebudayaan Jawa seperti membaca, menulis huruf jawa, menyanyi atau menembang serta mempelajari sejarah Keraton dimasukkan juga pengetahuan modern seperti matematika, Geografi hindia-belanda, ilmu hayat dan ilmu ukur tanah. Tidak puas dengan hasil yang diperoleh dari pendidikan Belanda di Jogjakarta Hamengkubuwono VIII mengirim putra-putri yang pandai untuk belajar ke Eropa. Pada 1906 di Batavia didirikan sekolah Ratu Wilhelmina atau koningin Wilhelmina school yang merupakan sekolah tertua, sekolah ini memiliki dua bagian yaitu

hogere burger school (HBS) yang lama di pendidikannya 3 tahun dengan jurusan perdagangan dan kelautan A serta kursus 3 dengan pengetahuan teknik B. Pada 1911 didirikan sekolah ke-2 dengan dukungan KPM atau koninklijke pakketvaart maatschappij yaitu sekolah HBS 3 tahun dengan jurusan teknik yang bernama sekolah Pangeran Hendrik atau prins Hendrik school. Pada 1917 sekolah HBS ketiga didirikan di Yogyakarta dengan jurusan Teknik pertukangan. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 203)

Kepentingan perusahaan swasta yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda memperoleh dukungan pemerintahan kolonial. Untuk mendukung pengembangan industri perkebunan pertambangan maupun manufaktur diperlukan teknisi Madya dan tukang yang dididik pada sekolah pertukangan untuk pengembangan sekolah teknik. Pada 1917 pemerintahan mendirikan 3 Sekolah Teknik, dengan murid sebanyak 986 orang. Di Jogjakarta Sekolah Dasar kelas 1 dan sekolah dasar kelas dua dikelola oleh pemerintah kolonial yang berdiri pada abad 20 demikian pula *hollandschindische school* atau HIS baru ada di daerah tersebut pada awal abad 20. Di Surakarta sekolah guru didirikan pada 1852 kemudian di tahun 1875 dipindahkan ke Magelang. Pada 1902 Sekolah dokter di Jawa berubah menjadi *school tot opleiding Van Indische artsen* atau STOVIA. Pada 1913 di Surabaya didirikan semacam sekolah *stovia* dengan nama *nederlandsch Indische artsen school* atau NIAS. Pada 1927 STOVIA ditingkatkan menjadi *geneeskundige high school* atau GHS. Pada 1912 di Sukabumi didirikan sekolah Pertanian dan Kehutanan Kemudian pada 1914 didirikan sekolah yang mempunyai tingkat yang lebih

tinggi sejak 1903 di Bogor diselenggarakan kursus tentang pertanian dan perkebunan guna membantu pertanian dan perkebunan rakyat. Kemudian pada 1907 dilakukan reorganisasi dalam penyelenggaraan kursus yaitu lulusan kursus ditempatkan sebagai Menteri Kehutanan. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 204)

Pada 1912 reorganisasi menyeluruh dilaksanakan dengan cara menambah waktu studi sekolah Pertanian dan Kehutanan menjadi 3 tahun. Pada 1909 sekolah pertukangan didirikan di Batavia Semarang dan Surabaya, sekolah pertukangan didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tukang yang diperlukan dalam industri Eropa yang sudah berkembang. Di sekolah tenaga tukang sekolah pertukangan setelah murid diberi berbagai mata pencaharian pelajaran seperti menyambung papan membuat tembok membuat gatel menempa besi menempa Tapal Kuda membuat meja membuat mesin besi membuat mebel kayu membuat mebel rotan membuat pekerjaan dari tembaga membuat kaleng dan mengecat. Setelah itu murid dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok pekerjaan kayu dan kelompok pekerjaan besi. (Hisyam, M. dan Ardhana, IK., 2012: 205)

Kondisi Sosial dalam Segi Jabatan

Dalam ciri khas dari masyarakat kolonial dalam perbedaan antara pekerjaan dari orang Eropa dan bukan orang Eropa. Pengangkatan dalam pekerjaan orang Eropa sangat ada kaitannya dengan gaji yang berskala khusus. Hal ini masuk dalam penghasilan C untuk skala B pengetahuan tentang bahasa Belanda yang diwajibkan dan untuk segala hal mewajibkan untuk bisa Bahasa Belanda dan beberapa pekerjaan mereka berpendidikan Dasar dengan bahasa

Indonesia. Untuk golongan upah pun tergolong dalam segala perubahan Bumiputera. (Ahmadin, 2017: 8)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, aspek perbedaan penghasilan itu sebaian besar disesuaikan dengan dengan perbedaan ras, dengan pengolongan rata-rata sedikit golongan Eropa di bagian atas dan banyak sekali golongan bumiputra di bagian bawah. Diagram ini menggambarkan, bahwa terdapat ketidak seimbangan pada penempatan masyarakat kolonial Jawa, dikarenakan diskriminasi ras dan faktor pendidikan yang minim pada masyarakat kolonial Jawa.

Kondisi Budaya Bangsa Indonesia pada Masa Awal Pergerakan Nasional Indonesia

Budaya pendidikanpun juga terjadi di masa pergerakan nasional, pendidikan sedikit di beda-bedakan. Sekolah untuk anak pribumi berbeda dengan anak bangsawan. Jadi, sebagian masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia sebagian masih berkebudayaan Indonesia tepatnya di daerah-daerah pedalaman, dan sebagian lagi masih menggunakan kebudayaan barat yaitu di daerah-daerah kota. Budaya di pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa juga sedikit berbeda. Pulau Jawa merupakan tempat penjajah memperluas wilayahnya, jadi sebagian penduduk pulau Jawa masih dipengaruhi oleh kebudayaan barat, khususnya kebudayaan para penjajah. (Hajati, Dra. Chusnul, dkk:1997)

Pejuangan kebudayaan melalui Organisasi Sebelum lahirnya masa pergerakan nasional, nasionalisme yang di lakukan oleh rakyat bersifat kedaerahan atau disebut juga dengan nasionalisme sempit. Hal ini di karenakan rakyat melawan kolonialisme dengan tujuan untuk memperjuangkan daerah masing-masing bukan atas kepentingan nasional bangsa Indonesia. Masa awal pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada awalnya organisasi ini dibentuk untuk membentuk kesatuan kebudayaan jawa. Tetapi tidak

hanya terpaku pada golongan jawa organisasi BO juga terbuka untuk seluruh golongan di Indonesia yang memiliki tujuan melawan kebudayaan barat dengan sikap nasionalisme. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional merupakan suatu perjuangan kebudayaan Indonesia. Dalam perkembangannya ada beberapa kendala yang dihapai oleh organisasi Boedi Oetomo salah satunya ketika menentukan rencana untuk menentukan sikap terhadap kebudayaan barat, dalam rapat atau kongres yang diadakan BO pada tahun 1908 muncul pendapat berbeda antara dua golongan. Golongan progresif berpendapat bahwa kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat Negara kita sudah baik tetapi kita perlu mengenal dan mempelajari metode-metode barat, sedangkan konservatif menginginkan Negara kita tetap berpegang teguh pada kebudayaan lama untuk menghimpun seluruh rakyat. Lambat laun di samping berkembangnya kedua pendapat tersebut, muncul dan berkembang suatu aliran baru yang menginginkan kebudayaan Indonesia menjadi satu kesatuan yaitu persamaan bahasa umum, pakaian, satu bangsa, dan tanah air. Golongan ini menyadari bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional sehingga mereka berpendapat bahwa integrasi antara kebudayaan barat dan timur itu perlu tanpa semata-mata meniru. Gerakan kebudayaan ini juga turut mendorong tumbuhnya rasa nasionalisme.

Kondisi Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Awal Pergerakan Nasional Indonesia

Kapitalisme kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan yang bisa dikatakan sebagai perkembangan yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini di buktikan dengan semakin besarnya aliran emas di Indonesia, produksi gula yang meningkat, antara tahun 1904-1913. Selain emas dan gula hasil alam lain seperti teh, karet, tembakau, lada, beras, kapuk, dan timah juga mengalami peningkatan.

Peningkatan hasil alam tersebut memberikan keuntungan karena produksi mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari 75 juta gulden menjadi 305 juta gulden. Dari penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pada masa ini sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Selain perkebunan dan pertanian, sejak tahun 1890 sampai abad XX awal pembangunan pelabuhan semakin meningkat, hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah industri di perkotaan. Kegiatan ekonomi industri ini di tujukan untuk menghasilkan suatu produksi yang dibutuhkan oleh pihak luar misalnya orang eropa. Selain pembangunan pelabuhan yang meningkat, sarana dan prasarana di kota turut mengalami kemajuan dalam pembangunan. Diantaranya pembangunan di sektor maritime, politik, ekonomi, serta sarana dan prasarana. dengan pembangunan industri yang semakin berkembang, tidak sedikit masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk bekerja. Akibat dari banyaknya perpindahan penduduk yang tidak teratur ini mengakibatkan munculnya berbagai macam wabah penyakit. (Hisyam dan Ardhana, 2012: 222)

Terlepas dari bagaimana keadaan rakyat pemerintah kolonial tetap memperoleh keuntungan yang besar dari system ekonomi yang mereka terapkan. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah kolonial membuat mereka semakin gencar dalam memperluas eksploitasi di indonesia, hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi pemerintah hindia belanda. Salah satu bukti pernyataan bahwa pemerintah menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan masyarakat yaitu adanya pembatalan pajak ekspor untuk minyak tanah dan pengurangan pembayaran pajak oleh pabrik gula, hal ini tentu saja memberikan kerugian yang besar bagi Negara. Sedangkan pajak masyarakat semakin ditingkatkan hingga 40% (untuk pulau jawa dan Madura) pada

masa pemerintahan Fock, hal ini didasarkan atas laporan Mayer Ranneftuender. Eksploitasi berlebihan ini lah yang nantinya menumbuhkan dan memunculkan adanya gerakan pertentangan dari rakyat atau disebut juga gerakan nasional. (Soejono dan Leirissa, 2010: 27-28)

Pada masa awal pergerakan nasional Indonesia keadaan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, banyak rakyat yang mengalami kekurangan bahan pangan dan kerugian dalam pekerjaan. Keadaan tersebut di akibatkan karena tindakan pemerintah kolonialisme yang meng eksploitasi sumber daya Indonesia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kegiatan eksploitasi dari pemerintah hindia belanda juga menimbulkan terjadinya pertentangan-pertentangan dari masyarakat dan hal ini terjadi secara terus menerus. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah hindia-belanda merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk melindungi keadaan ekonomi mereka, agar tetap memperoleh banyak keuntungan. Meskipun pemerintah kolonial pada masa ini sudah menghapuskan istilah *wingewest* tetapi pemerintah kolonial masih mengizinkan dan melegalkan eksploitasi modal secara perorangan. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik kolonial tetap menjadi yang utama ketimbang nasib dari rakyat jajahan yang terus berada dalam jurang kemiskinan. Keadaan ini mengakibatkan pertentangan terus terjadi di kalangan masyarakat dimana kehidupan masyarakat semakin tebelakang dan tidak mampu menyaingi kapitalisme pemerintah hindia belanda yang memiliki organisasi serta teknologi modern yang bisa mengubah kehidupan dan sistem ekonomi di Indonesia Selain itu sikap pemerintah kolonial yang terus menerus melakukan eksploitasi mengakibatkan masyarakat melakukan emansipasi atau perjuangan di bidang ekonomi. Keadaan masyarakat yang semakin tertekan akibat eksploitasi mengakibatkan solidaritas antar

masyarakat semakin kuat. Solidaritas ini diwujudkan dengan aksi pembencian terhadap warga asing terutama orang cina. Cina menjadi salah satu etnis luas yang paling dibenci karena keberadaan cina menjadi penghambat pedagang lokal untuk mengembangkan perdagangannya.aksi lain yang di lakukan dalam angka menentang kolonialis yaitu, dalam setiap kongresnya rakyat melancarkan kritikan pedas terhadap sosial ekonomi yang memprihatinkan, kerja paksa, upah yang minimum, pajak tanah, tanah partikelir, industri gula dsb.

D.Kesimpulan

Kesimpulan terbentuknya Gubernur Jenderal tidak terlepas dari usaha pemerintah Belanda dalam mempermudah pengawasan dan pengelolaan tanah jajahanaya. Maka dibentuklah Gubernur Jenderal, gubernur jenderal sendiri merupakan ketua Rad van Naderlandsch-Indie atau organisasi pusat pemerintah kolonial Hindia Belanda yang anggotanya tidak lebih dari enam orang. Gubernur Jenderal pertama adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610. Meskipun bentuk kepemimpinan seperti ini diterapkan pada saat masa VOC ternyata kepemimpinan gubernur jenderal terus digunakan hingga masa pemerintahan Hindia Belanda, namun hanya saja kedudukan dewan hindia bertugas sebagai dewan penasihat. (Hisyam dan Ardhana 2012: 54)

Pemerintahan Hindia belanda sendiri merupakan kepanjangan dari kerajaan Belanda. Dalam menggerakan roda pemerintahan setiap harinya Gubernur Jenderal didampingi oleh sebuah Lembaga yang Bernama *Algemeene Secretarie*, Lembaga ini bertugas di kantor gubernur jenderal, secara khusus Lembaga ini menangani korespondensi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda. Para kepala itu harus diangkat atau diakui oleh gubernur jenderal. Dasar dari pemerintah kolonial Hindia belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan

Belanda, undang-undang ini memuat syarat-syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan negara induk. (Soejono & Leirissa, 2010:10)

Pendidikan waktu itu atau masa pergerakan barat tahun 1928 lebih banyak oleh pendidikan barat. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan barat lebih diperluas dan memegang prinsip menjadi lebih terbuka. Meskipun sudah memiliki prinsip demikian, pendidikan barat ini tetap membatasi, karena memang pada dasarnya pendidikan ini tidak sepenuhnya bersifat terbuka dan hanya sedikit dari masyarakat yang berasal dari kolonial hanya mengirimkan anaknya untuk memperoleh pendidikan pada sekolah bergaya barat ini. Setelah dicanangkannya politik etis, program pengembangan pendidikan bagi pribumi di Hindia Belanda digalakan secara lebih serius, rintisan pengembangan ini sudah dimulai masa pemerintahan Deandels.

Untuk mendukung pengembangan industri perkebunan pertambangan maupun manufaktur diperlukan teknisi Madya dan tukang yang dididik pada sekolah pertukangan untuk pengembangan sekolah teknik. Pada 1917 pemerintahan mendirikan 3 Sekolah Teknik, dengan murid sebanyak 986 orang. Di Jogjakarta Sekolah Dasar kelas 1 dan sekolah dasar kelas dua dikelola oleh pemerintah kolonial yang berdiri pada abad 20 demikian pula *hollandsch inlandsche school* atau HIS baru ada di daerah tersebut pada awal abad 20. Di Surakarta sekolah guru didirikan pada 1852 kemudian di tahun 1875 dipindahkan ke Magelang.

Pada 1902 Sekolah dokter di Jawa berubah menjadi *school tot opleiding Van Indische artsen* atau STOVIA. Pada 1913 di Surabaya didirikan semacam sekolah *stovia* dengan nama *nederlandsch Indische artsen school* atau NIAS. Pada 1912 di Sukabumi didirikan sekolah Pertanian dan Kehutanan. Kemudian pada 1914 didirikan sekolah yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi sejak 1903 di

Bogor diselenggarakan kursus tentang pertanian dan perkebunan guna membantu pertanian dan perkebunan rakyat. Pada 1912 reorganisasi menyeluruh dilaksanakan dengan cara menambah waktu studi sekolah Pertanian dan Kehutanan menjadi 3 tahun.

Pada 1909 sekolah pertukangan didirikan di Batavia Semarang dan Surabaya, sekolah pertukangan didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tukang yang diperlukan dalam industri Eropa yang sudah berkembang. Di sekolah tenaga tukang sekolah pertukangan setelah murid diberi berbagai mata pencaharian pelajaran seperti menyambung papan membuat tembok membuat gatel menempa besi menempa Tapal Kuda membuat meja membuat mesin besi membuat mebel kayu membuat mebel rotan membuat pekerjaan dari tembaga membuat kaleng dan mengecat.

Budaya pendidikanpun juga terjadi di masa pergerakan nasional, pendidikan sedikit di beda-beda. Sekolah untuk anak pribumi berbeda dengan anak bangsawan. Jadi, sebagian masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia sebagian masih berkebudayaan Indonesia tepatnya di daerah-daerah pedalaman, dan sebagian lagi masih menggunakan kebudayaan barat yaitu di daerah-daerah kota. Budaya di pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa juga sedikit berbeda. Pulau Jawa merupakan tempat penjajah memperluas wilayahnya, jadi sebagian penduduk pulau Jawa masih dipengaruhi oleh kebudayaan barat, khususnya kebudayaan para penjajah.

Kapitalisme kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan yang bisa dikatakan sebagai perkembangan yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini di buktikan dengan semakin besarnya aliran emas di Indonesia, produksi gula yang meningkat, antara tahun 1904-1913. Diantaranya pembangunan di sektor maritime, politik, ekonomi, serta sarana dan prasarana. dengan

pembangunan industri yang semakin berkembang, tidak sedikit masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk bekerja. Akibat dari banyaknya perpindahan penduduk yang tidak teratur ini mengakibatkan munculnya berbagai macam wabah penyakit.

Terlepas dari bagaimana keadaan rakyat pemerintah kolonial tetap memperoleh keuntungan yang besar dari system ekonomi yang mereka terapkan. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah kolonial membuat mereka semakin gencar dalam memperluas eksploitasi di Indonesia, hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Salah satu bukti pernyataan bahwa pemerintah menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan masyarakat yaitu adanya pembatalan pajak ekspor untuk minyak tanah dan pengurangan pembayaran pajak oleh pabrik gula, hal ini tentu saja memberikan kerugian yang besar bagi Negara. Sedangkan pajak masyarakat semakin ditingkatkan hingga 40% pada masa pemerintahan Fock, hal ini didasarkan atas laporan Mayer Ranneftuender. Eksploitasi berlebihan inilah yang nantinya menumbuhkan dan memunculkan adanya gerakan pertentangan dari rakyat atau disebut juga gerakan nasional.

Pada masa awal pergerakan nasional Indonesia keadaan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, banyak rakyat yang mengalami kekurangan bahan pangan dan kerugian dalam pekerjaan. Solidaritas ini diwujudkan dengan aksi pembencian terhadap warga asing terutama orang Cina. Cina menjadi salah satu etnis luas yang paling dibenci karena keberadaan Cina menjadi penghambat pedagang lokal untuk mengembangkannya. Aksi lain yang dilakukan dalam rangka menentang kolonialisme yaitu, dalam setiap kongresnya rakyat melancarkan kritikan pedas terhadap sosial ekonomi yang memprihatinkan, kerja paksa, upah

yang minimum, pajak tanah, tanah partikelir, industri gula dsb.

Sebelum lahirnya masa pergerakan nasional, nasionalisme yang dilakukan oleh rakyat bersifat kedaerahan atau disebut juga dengan nasionalisme sempit. Hal ini dikarenakan rakyat melawan kolonialisme dengan tujuan untuk memperjuangkan daerah masing-masing bukan atas kepentingan nasional bangsa Indonesia. Masa awal pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo, pada awalnya organisasi ini dibentuk untuk membentuk kesatuan kebudayaan Jawa. Tetapi tidak hanya terpaku pada golongan Jawa organisasi BO juga terbuka untuk seluruh golongan di Indonesia yang memiliki tujuan melawan kebudayaan Barat dengan sikap nasionalisme.

Daftar Referensi

- Agung, L. & Suparman, T. (2016) *Sejarah Pendidikan*. Cetakan Kedua. Jogjakarta: Ombak.
- Ahmadin. (2017). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* Cetakan ketiga. Makasar: RAYHAN INTERMEDIA
- Hisyam, M dan Ardhana, IK. (2012). *Indonesia dalam arus Sejarah Jilid 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Soejono, RP. & Leirissa, R.Z. (Ed) (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (1900-1942)*. Jakarta: Barat Pustaka
- Bloembergen, Marieke. (2011). *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hasanah, M., (2015), *Ekonomi Politik Kolonialisme : Perspektif kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri*

Gula Mangkunegara, Yogyakarta

Polgov

Kuntowijoyo, (2013). Pengantar Ilmu
Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana